



## Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya

Agus Widiyarta, Isni Humaidah

Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur

Received: 13 Agustus 2023

Revised : 25 Agustus 2023

Accepted: 31 Agustus 2023

### Abstract

*The Digital Population Identity Application (IKD) which has been issued by the Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs is one of the innovations as well as an adaptation during the transitional period in the development of digitalization in Indonesia. One of the cities implementing digitalization is the city of Surabaya. Surabaya City is one of the cities in East Java Province which consists of 31 sub-districts and has 154 sub-districts in it. One of them is Jepara Village. With so many residents in the city of Surabaya, automatically every day there are always problems related to population administration, one of which is the limited availability of E-KTP blanks. This problem is the basis for the application of Digital Population Identity (IKD). This study aims to determine the Implementation of Digital Population Identity (IKD) Activation in Encouraging Digitalization in Jepara Village, Surabaya City with the Policy Implementation model by George C. Edward III. The research method used in this study is descriptive qualitative using data collection techniques in the form of observation and documentation. The results of this study indicate that the Jepara Village has carried out the entire activation process according to the procedure. However, in order to maximize or improve related performance, there is a need for continuous outreach to increase citizens to activate Digital Population Identity (IKD).*

**Keywords:** *Public Policy, Policy Implementation, and Digital Population Identity*

(\*) Corresponding Author: [Agus\\_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:Agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id)

**How to cite :** Widiyarta A, & Humaidah I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan merupakan negara berkepulauan yang menjadikan persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata itu menjadikan adanya suatu permasalahan yang membuat pemerintah mau tidak mau untuk mengambil langkah suatu kebijakan. Apalagi dengan era sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih.

Semakin pesat dan canggihnya teknologi informasi dan komunikasi itu tentunya sangat memudahkan manusia untuk melaksanakan segala aktivitasnya dengan efektif dan efisien. Teknologi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hampir semua aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan dan tidak terkecuali pada sektor pemerintahan. Hal ini sangat mendukung berbagai macam kegiatan pemerintahan, termasuk dalam kegiatan administrasi kependudukan dengan menerapkan

pemerintah berbasis digital. Salah satu Kota yang menerapkan digitalisasi adalah Kota Surabaya.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 31 kecamatan dan memiliki 154 kelurahan di dalamnya. Kota Surabaya menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menjadikan banyak warga dari daerah lain untuk pindah datang ke Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah penduduk kurang lebih 2.972.801 jiwa penduduk pada tahun 2022. Salah satu kelurahan yang ada di Kota Surabaya yaitu Kelurahan Jepara. Kelurahan Jepara merupakan yang berada di wilayah Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya dengan jumlah penduduk kurang lebih 27.907 jiwa penduduk dan Kelurahan Jepara ini terdiri dari 9 RW serta juga 97 RT.

**Gambar 1. 1** Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia

	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0-4	107 999	107 043	106 096	103 565	102 663	101 785	211 564	209 706	207 881
5-9	108 635	107 536	106 192	104 265	103 436	102 441	212 900	210 972	208 633
10-14	99 068	98 976	98 710	95 176	95 048	94 735	194 244	194 024	193 445
15-19	109 179	108 479	108 057	118 953	118 284	117 814	228 132	226 763	225 871
20-24	143 705	144 661	145 046	147 072	147 358	147 368	290 777	292 019	292 414
25-29	136 143	137 343	138 428	134 994	135 581	136 003	271 137	272 924	274 431
30-34	126 616	125 978	125 760	127 371	126 098	125 530	253 987	252 076	251 290
35-39	117 794	116 992	115 853	119 940	119 206	117 878	237 734	236 198	233 731
40-44	106 362	105 843	105 416	108 880	108 846	108 898	215 242	214 689	214 314
45-49	95 144	95 379	95 330	101 417	101 564	101 506	196 561	196 943	196 836
50-54	85 490	86 854	87 930	93 475	94 898	96 000	178 965	181 752	183 930
55-59	70 803	72 281	73 813	77 440	79 841	82 107	148 243	152 122	155 920
60-64	50 433	52 247	53 836	49 876	52 420	54 715	100 309	104 667	108 551
65-69	33 810	35 742	37 547	32 170	33 603	35 425	65 980	69 345	72 972
70-74	18 348	19 089	20 109	20 406	20 853	21 331	38 754	39 942	41 440
75+	16 048	16 545	17 030	24 978	25 508	26 062	41 026	42 053	43 092
Total	1 425 577	1 430 888	1 435 153	1 459 978	1 465 207	1 469 598	2 885 555	2 896 195	2 904 751

Dengan banyaknya penduduk yang ada di Kota Surabaya, secara otomatis setiap harinya selalu ada permasalahan warga terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pada saat ini dapat dikatakan bahwa warga masih kurang tertib dan juga paham akan pentingnya *update* data terkait administrasi kependudukan mereka masing-masing. Administrasi Kependudukan atau adminduk ini merupakan dasar bagi semua pelayanan yang diperuntukan untuk masyarakat mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Dengan demikian, diperlukan kesadaran masyarakat dalam hal kepengurusan data administrasi kependudukan. Sehingga masyarakat memperoleh data administrasi kependudukan yang mutakhir dengan cepat dan mudah.

Salah satu data administrasi kependudukan adalah Identitas Kependudukan Digital atau yang disebut dengan (IKD). Mengingat banyaknya jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya, yang otomatis setiap harinya terdapat permasalahan warga dalam mengurus KTP Elektronik. Pengajuan KTP Elektronik setiap harinya tidak pernah ada habisnya, baik itu karena rusak, perubahan elemen, hingga hilang. Padahal blangko KTP-Elektronik yang tersedia sangatlah terbatas sehingga pemerintah Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghimbau untuk menggunakan digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).

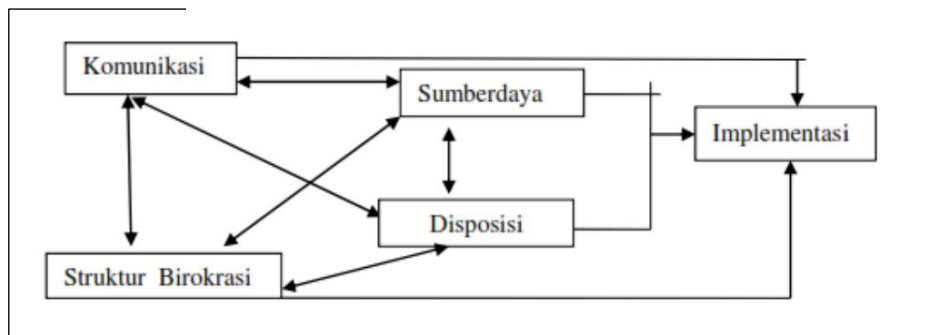
Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat

Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menghimbau warga Kota Surabaya untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Salah satu kelurahan yang diberikan tugas untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah Kelurahan Jepara.

### Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2007) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Model ini mengasumsi bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

**Gambar 2. 1** Model Implementasi George C. Edward III



*Sumber : Mulyono, 2023*

Empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor ini mempunyai peran penting dalam pengaruhnya terhadap pencapaian keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Mengkaji suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Dari pendapat para ahli tersebut, bisa ditarik yaitu kesimpulan yang pada intinya adalah menempatkan implementasi kebijakan sebagai suatu pencapaian tujuan-tujuan daripada kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat banyak (publik) dengan melibatkan berbagai pihak (masyarakat dan swasta). Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, pihak pemerintah berposisi sebagai *leading sector*. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Negara, dalam rangka memberikan kemudahan bagi warganya. Untuk itu dalam implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini juga dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi Kebijakan atau program tersebut dari perspektif teori George C. Edward III. Dipakai Teori ini karena model George C. Edward III cocok dengan karakteristik kebijakan, yang merupakan kebijakan secara nasional yang ditetapkan secara *top down*.

### **Identitas Kependudukan Digital**

Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Tujuan dari adanya Identitas Kependudukan Digital :

- a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan
- b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk
- c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital
- d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya dibawah naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Selain itu, analisis dalam penelitian ini didasarkan pada model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III dengan berdasarkan pada 4 (empat) faktor yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur organisasi. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan juga dokumentasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengacu pada fokus penelitian menurut George C. Edward III, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan harus berdasarkan 4 (empat) elemen atau faktor yang saling berkaitan dan berhubungan. Sehingga apabila salah satu elemen atau faktor tersebut yang tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi suatu pelaksanaan sebuah kebijakan.

#### **Komunikasi**

Dalam melaksanakan program Identitas Kependudukan Digital (IKD), selaku *leading sector* Kementerian Dalam Negeri khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung-jawab penuh dalam mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Faktor komunikasi menjadi salah satu penentu atau faktor penting bagi terlaksananya Identitas Kependudukan Digital (IKD). Komunikasi berkaitan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan e-KTP.

**Gambar 4. 1** Pelaksanaan Sosialisasi dan Aktivasi IKD di Balai RW Kelurahan Jepara Kota Surabaya



*Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023*

Berkaitan dengan sosialisasi program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)., Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ini bersama-sama dengan seluruh instansi untuk memberikan pemahaman terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) sehingga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya seperti melakukan sosialisasi dengan mengundang masyarakat ke Balai RW sesuai RW di Kelurahan Jepara Kota Surabaya untuk diberikan pengarahan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD). Masyarakat diundang secara bergantian untuk setiap kelurahan selama beberapa hari. . Pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi IKD dimulai pada tanggal 28 April – 25 Mei 2023, setiap hari Senin – Jum'at di Balai RW 01 – Balai RW 09. Masing-masing Balai RW mendapatkan jadwal 2 hari. Pihak kelurahan meminta tolong ke Ketua RW dan juga Ketua RT untuk diminta mengorganisir warganya untuk datang ke Balai RW mereka masing-masing agar mendapatkan informasi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus melakukan aktivasi. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi paham terhadap program Identitas Kependudukan Digital (IKD).

#### **Sumber Daya**

Adanya sumber daya yang memadai dan baik menjadi salah satu syarat dalam menciptakan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah dapat berupa sumber daya manusia, peralatan dan keuangan. Sumber daya ini menjadi mesin penggerak bagi bekerjanya sebuah program. Sumber daya menjadi energi bagi terlaksananya suatu program. Tanpa sumber daya yang mencukupi, mustahil program dapat dilaksanakan dengan baik.

Implementasi program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jepara dilengkapi dengan penyediaan sumber daya. Pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang diperlukan untuk mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kelurahan Jepara ini terdapat 4 (empat) orang yang bertugas dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang disebut dengan operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4. 1** Daftar Operator Siak Kelurahan Jepara Kota Surabaya

No.	Nama	Jabatan	Penempatan Aktivasi
1.	Faradila	PNS	Kelurahan Jepara
2.	Riza	Tenaga Kontrak	Kelurahan Jepara
3.	Isni	Magang	Balai RW
4.	Fachran	Magang	Balai RW

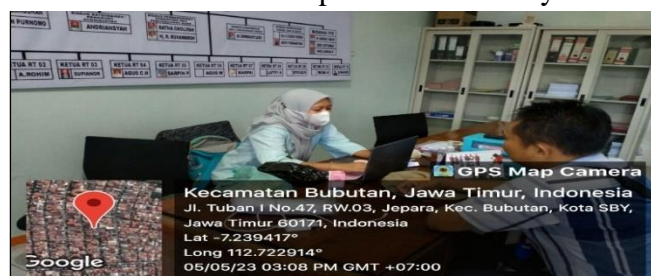
*Sumber : Kelurahan Jepara, 2023*

Berdasarkan data tersebut, petugas operator yang magang hanya diberikan kesempatan memiliki akun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan jadwal aktivasi yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Sementara operator yang PNS dan tenaga kontrak tidak karena akun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bersangkutan juga digunakan untuk verifikasi permohonan lainnya seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pindah Datang, dan juga lainnya.

Sementara itu, untuk sumber daya peralatan yang tersedia di Kelurahan Jepara Kota Surabaya ini kurang maksimal karena komputer yang ada di Kelurahan yang digunakan untuk aktivasi masih lemot dan juga bagi peserta magang yang ditugaskan untuk memegang akun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini menggunakan laptop milik peserta magang sendiri dan laptop tersebut juga lemot sehingga sedikit memperlambat pelaksanaan.

Dari sisi anggaran dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tepatnya di Kelurahan Jepara ini tidak ada anggaran. Karena semuanya gratis. Dan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini hanya memerlukan jaringan internet dan *smartphone* sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak memerlukan blangko.

**Gambar 4. 2** Operator SIAK untuk aktivasi IKD di Balai RW Kelurahan Jepara Kota Surabaya



*Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023*

### **Disposisi**

Dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan, komitmen atau kemauan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Komitmen harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program dan masyarakat yang menjadi target atau sasaran kebijakan. Komitmen yang kuat dapat menjadi modal bagi terlaksananya dan terwujudnya kebijakan. Dengan adanya komitmen, berbagai masalah dalam implementasi kebijakan bisa dipecahkan karena setiap pelaksana program berpikir dan bertindak untuk mensukseskan implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jepara Kota Surabaya pastinya masih memiliki kendala yang dihadapi oleh operator SIAK di lapangan, yaitu rendahnya kemauan masyarakat untuk datang ke Balai RW dalam melakukan aktivasi. Hal tersebut dikarenakan masih banyak warga yang bekerja, warga tidak memiliki *smartphone*, *smartphone* tidak support, hingga alasan warga malas karena menganggap Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini tidak penting. Hal tersebut membuat warga kurang antusias. Hal ini dibuktikan dengan jumlah warga yang datang untuk melakukan aktivasi yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4. 2** Jumlah Warga yang aktivasi Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Jepara Kota Surabaya

<b>No</b>	<b>RW (Kelurahan Jepara)</b>	<b>Jumlah</b>
1	RW 01	34
2	RW 02	97
3	RW 03	25
4	RW 04	2
5	RW 05	32
6	RW 06	18
7	RW 07	44
8	RW 08	16
9	RW 09	23

*Sumber : Rekap Data Peneliti selama melakukan aktivasi, 2023*

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini dilakukan secara berjenjang. Di tingkat pusat, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab menginisiasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Di Kota Surabaya, instansi yang terlibat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat berjalan sendirian. Terdapat kecamatan dan juga kelurahan yang membantu sehingga mempermudah dalam hal aktivasinya.

Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi ujung tombak implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini , karena

bertanggungjawab terkait melakukan sosialisasi, mengorganisir masyarakat, memverifikasi data dengan membantu scan barcode. Setelah semua proses dilakukan, aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini bisa langsung digunakan oleh warga terkait karena tidak perlu dicetak dan segala macam.

Namun disamping itu, fakta lain yang ditemukan di lapangan yaitu adanya ketidakselarasan kebijakan terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghimbau warga untuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), namun instansi / perusahaan / bank masih belum menerima identitas digital. Masih meminta identitas dalam bentuk fisik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan juga pembahasan tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu secara umum *pilot project* program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah dilaksanakan sesuai dengan arahan. Namun disamping itu, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga di Kelurahan Jepara Kota Surabaya seperti *smartphone* belum *support*, ada warga yang tidak memiliki *smartphone*, antusias warga kurang, dan perangkat yang digunakan untuk SIAK masih lemot. Sementara itu, disamping permasalahan yang ada tentunya terdapat manfaat dari adanya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yaitu memudahkan masyarakat, dapat mendorong proses digitalisasi, hingga dapat menghemat anggaran dalam blangko KTP-el.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terkait Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. Pada dasarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kelurahan Jepara telah melakukan seluruh proses aktivasi sesuai dengan prosedur. Namun untuk memaksimalkan atau perbaikan dalam kinerja terkait yaitu perlu adanya sosialisasi yang terus menerus dilakukan supaya meningkatkan warga untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sosialisasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk warga, namun bisa juga ke bank, instansi, atau perusahaan supaya seluruh bank, instansi, atau perusahaan dapat menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tidak hanya itu, perlu adanya *training* untuk petugas pelayanan di Balai RW dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Slamet Hadi Purnomo. (2020, October 24). *Warga Surabaya diimbau gunakan chanel pengaduan saat ada kendala urus adminduk*. ANTARA News Jawa Timur; ANTARA News Jawa Timur.  
<https://jatim.antaranews.com/berita/426369/warga-surabaya-diimbau-gunakan-chanel-pengaduan-saat-ada-kendala-urus-adminduk>

- Disdukcapil Kota Surabaya – Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*. (2023). Surabaya.go.id.  
<https://disdukcapil.surabaya.go.id/>
- Badan Pusat Statistik*. (2018). Bps.go.id.  
<https://surabayakota.bps.go.id/indicator/12/197/1/proyeksi-penduduk-kota-surabaya.html>
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori Proses dan Studi Kasus)*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta.
- Disdukcapil. (2015). *Identitas Kependudukan Digital | Disdukcapil*. Sidoarjo.go.id. <https://disdukcapil.sidoarjo.go.id/informasi/identitas-kependudukan-digital>
- Simbolon, C. D. (2023, February 11). *Syarat dan cara membuat identitas digital*. <https://www.alinea.id/>; Alinea ID. <https://www.alinea.id/infografis/syarat-dan-cara-membuat-identitas-digital-b2hLO9Kv5>
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaava Media
- mulyono. (2009, May 28). *Model Implementasi kebijakan George Edward III - FREE WRITTING IN THE WALL*. FREE WRITTING in the WALL.  
<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>

33-139